

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan 2014

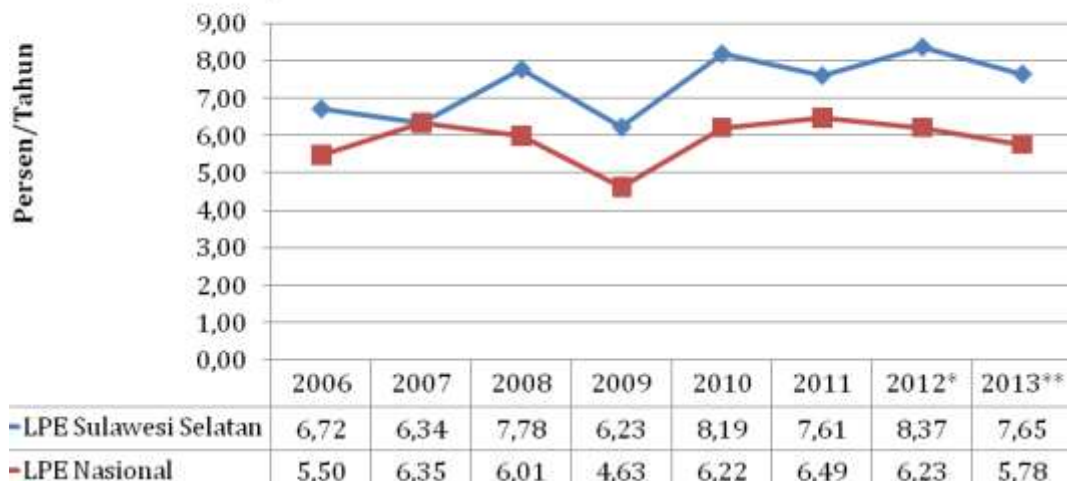
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan periode tahun 2006-2013 cukup baik dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,36 persen. Angka ini lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,90 persen pada periode yang sama (Gambar 1). Di tingkat wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan output (PDRB) terbesar karena pada tahun 2013 telah berkontribusi sebesar 49,97 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Sulawesi dan 2,37 persen terhadap pembentukan PDB nasional. Peran Provinsi Sulawesi Selatan sangat strategis dalam mendukung Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel khususnya sebagai simpul pertanian pangan, simpul perikanan, dan kluster industri. Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan internasional yang semakin meningkatkan posisi strategisnya.

**Gambar 1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000**

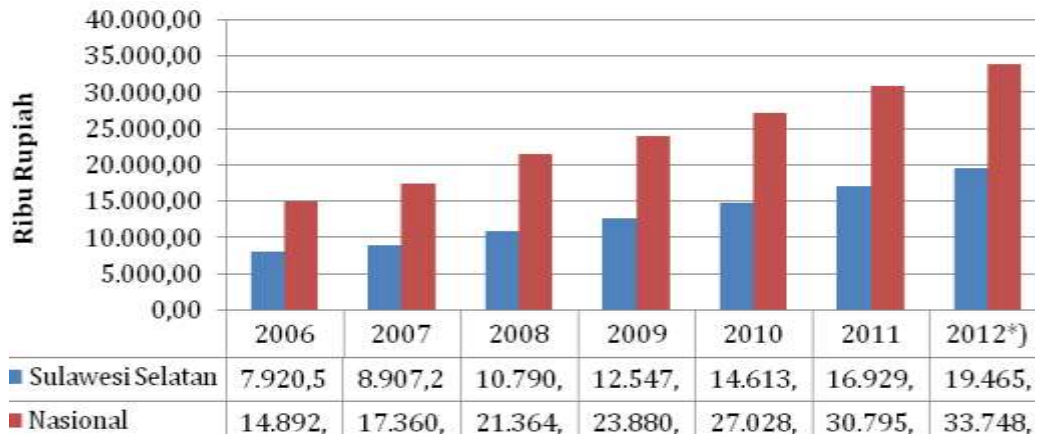


Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Sulawesi Selatan berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan relatif tidak baik secara nasional (Gambar 2). Besarnya PDRB

perkapita Sulawesi Selatan cenderung meningkat, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2006-2012 juga meningkat. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Sulawesi Selatan dan PDB perkapita nasional adalah sebesar 53,19 persen, maka pada tahun 2012 rasionya meningkat menjadi 57,68 persen. Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, kinerja rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan telah berkembang lebih cepat dari provinsi lain.

**Gambar 2**  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

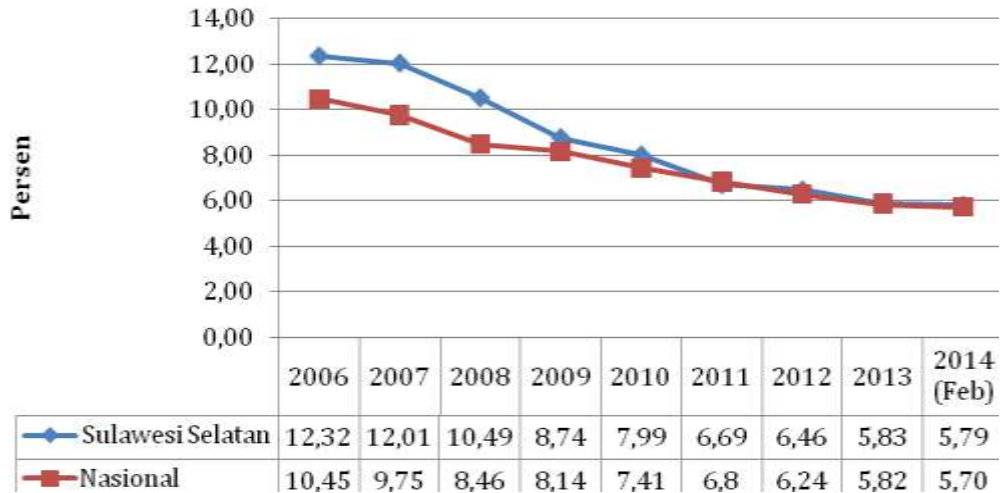


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2006-2013 berkurang sebesar 6,49 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. TPT Sulawesi Selatan periode 2006-2012 termasuk tinggi bila dibandingkan dengan TPT nasional, namun sejak 2013 TPT Sulawesi Selatan hampir sama dengan TPT nasional (Gambar 3). Namun demikian tingginya tingkat pengangguran di tengah pendapatan per kapita yang moderat mengindikasikan bahwa pengangguran tersebut kemungkinan besar merupakan tenaga yang tidak terdidik karena tidak berimbas langsung pada rendahnya produktivitas pekerja di tingkat daerah. Hal ini dapat ditelusuri lebih lanjut dengan melihat kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

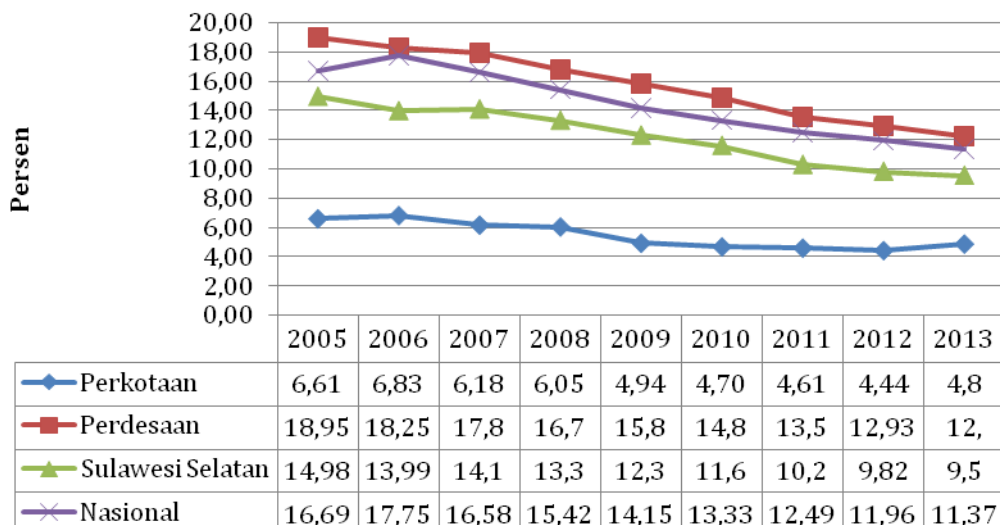


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Selama periode 2005-2013 persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan cenderung berkurang, dan mencapai 9,54 persen pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan penduduk Sulawesi Selatan khususnya di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin nasional mencapai 11,37 persen, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan khususnya pedesaan sudah mencapai 12,2 persen (Gambar 4). Namun demikian, di tingkat Wilayah Sulawesi, kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan ini merupakan yang terendah kedua setelah Provinsi Sulawesi Utara.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

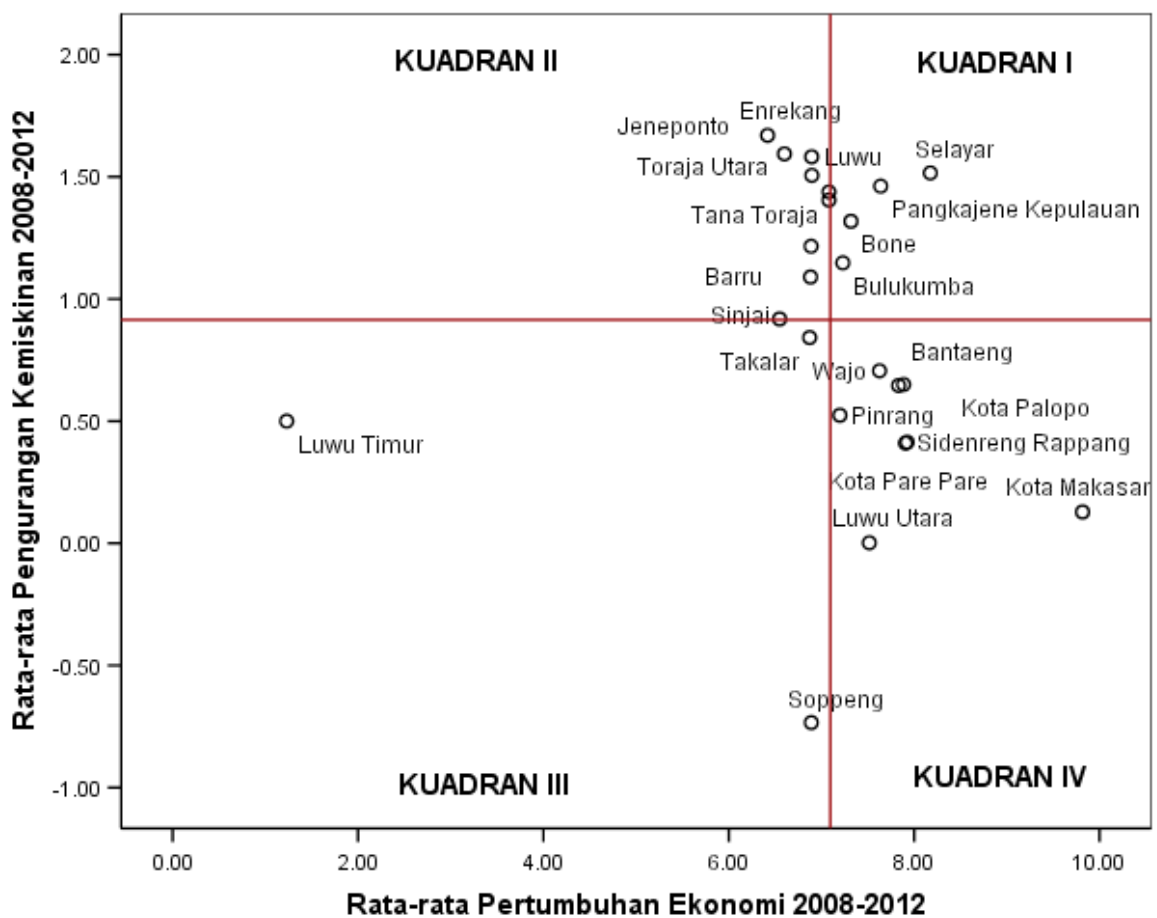
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

*Pertama*, Kabupaten Selayar, Pangkajene Kepulauan, Bone, Bulukumba terletak di kuadran I, termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan..

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kabupaten Enrekang, Jeneponto, Toraja Utara, Luwu, Tana Toraja, Barru, Maros, dan Sinjai terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Soppeng, Takalar dan Luwu Timur terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Wajo, Bantaeng, Pinrang, Sidenreng Rappang, Luwu Utara, Takalar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, dan Kota Makassar terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

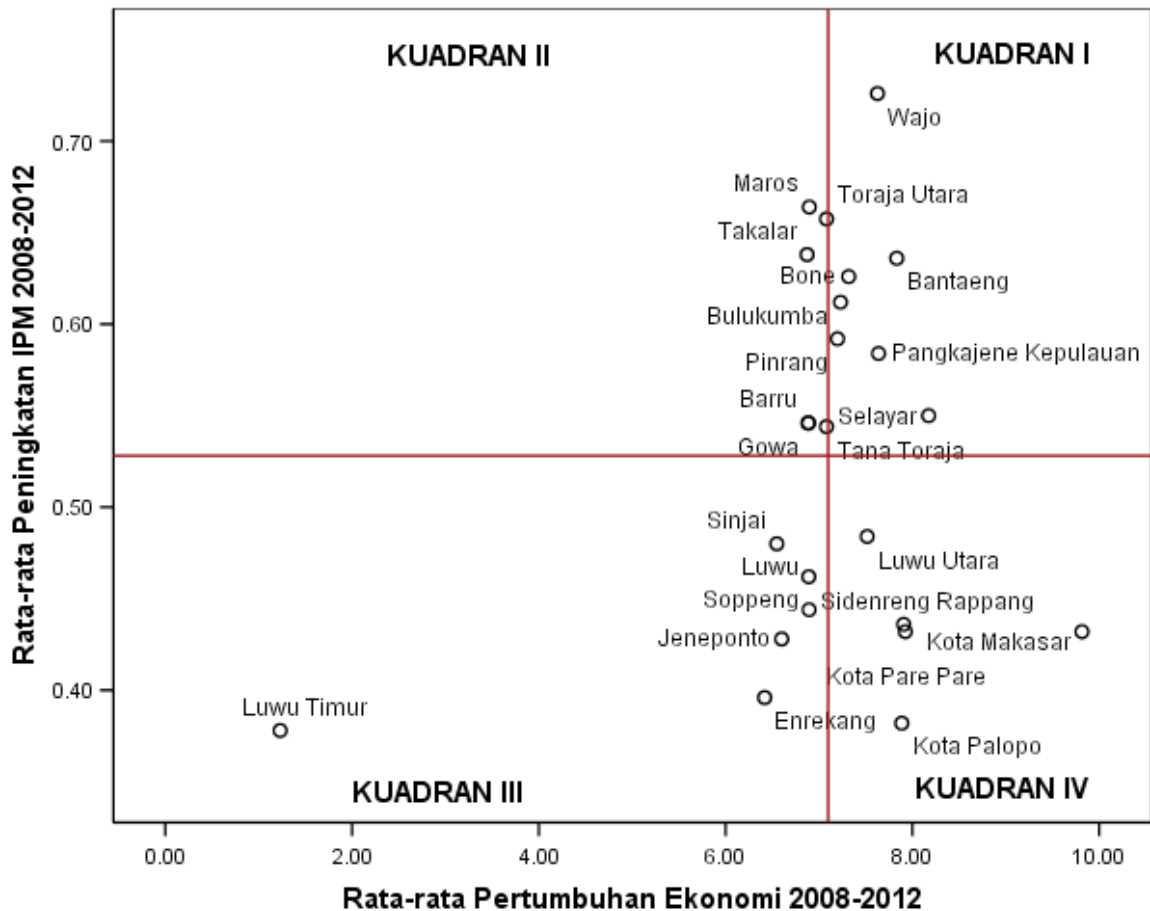
Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Wajo, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Pinrang, Pangkajene Kepulauan, dan Selayar terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Maros, Toraja Utara, Takalar, Barru, Gowa, dan Tana Toraja yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi



melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Sinjai, Luwu, Soppeng, Sidenreng Rappang, Jeneponto, Enrekang, dan Luwu Timur terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

*Keempat*, Kabupaten Luwu Utara, Kota Makasar, Kota Pare-pare, dan Kota Palopo terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

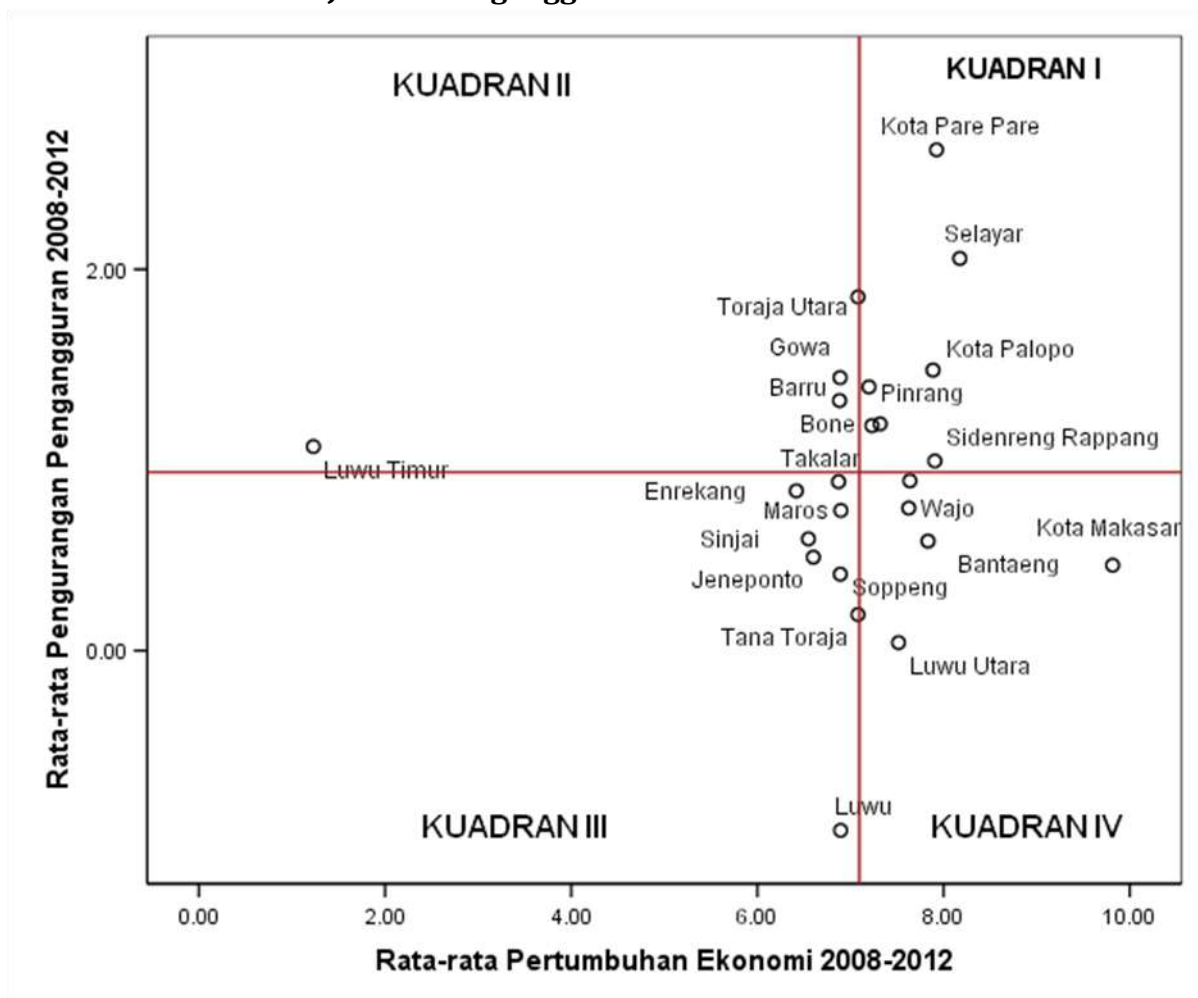


### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012.

*Pertama*, Kabupaten Pinrang, Selayar, Bulukumba, Bone, Sidenreng Rappang, Kota Palopo dan Kota Pare-pare termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan**  
**Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kabupaten Toraja Utara, Gowa, Barru, Luwu Timur, yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata,

tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

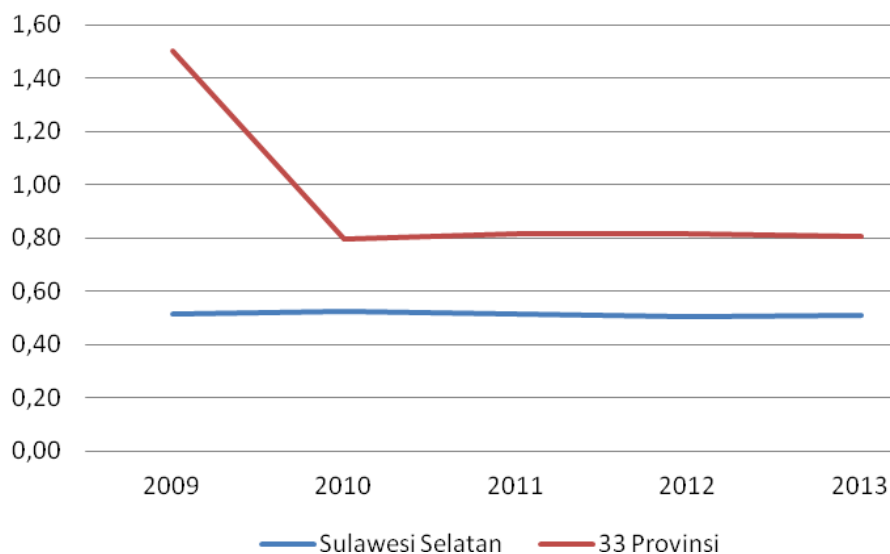
*Ketiga*, Kabupaten Enrekang, Maros, Sinjai, Jeneponto, Tana Toraja, Soppeng dan Luwu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

*Keempat*, Kabupaten Wajo, Bantaeng, Oangkajene Kepulauan Luwu Utara, dan Kota Makasar terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 berada di bawah rata-rata 33 provinsi dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi wilayah Sulawesi Selatan termasuk dalam kelompok kesenjangan sedang. Rata-rata nilai indeks williamson nasional pada periode yang sama sebesar 0,95 cukup jauh berada di atas nilai masing-masing wilayah di Indonesia.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan cukup tinggi, walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Potensi sumber daya alam (tambang nikel) di Kabupaten Luwu Timur cukup bisa diandalkan dalam menopang kehidupan sosial ekonominya walaupun tidak semua penduduk terlibat secara langsung dalam proses produksi pertambangan. Kabupaten ini memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi di Sulawesi Selatan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki sektor pertambangan tidak terbarukan cenderung memiliki PDRB perkapita yang tinggi, menunjukkan peranan sektor pertambangan cukup besar dalam pembentukan PDRB kabupaten/kota.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2007-2012 (000/jiwa)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Selayar	5.437	6.471	7.601	9.238	11.243	13.722
Bulukumba	5.699	6.967	8.305	9.501	10.755	12.581
Bantaeng	5.946	7.140	8.728	1.035	12.221	14.132
Jeneponto	3.843	4.611	5.493	6.608	7.731	8.891
Takalar	4.914	5.885	6.891	7.592	8.696	9.998
Gowa	4.639	5.530	6.723	7.755	8.994	12.129
Sinjai	7.125	8.763	10.536	12.247	13.995	15.976
Maros	4.896	5.730	6.823	8.113	9.432	10.744
Pangkajene Kepulauan	10.646	12.777	15.188	17.524	20.767	13.669
Barru	6.184	7.460	8.723	9.998	11.359	13.032
Bone	6.263	7.541	8.985	10.453	12.189	14.234
Soppeng	7.130	8.719	10.360	12.142	14.196	13.316
Wajo	8.565	10.258	12.149	13.990	17.111	19.904
Sidenreng Rappang	7.463	9.057	10.949	12.334	15.350	17.778
Pinrang	8.888	10.810	12.891	15.010	17.529	20.268
Enrekang	6.119	7.210	8.558	10.060	11.926	13.481
Luwu	6.979	8.265	9.698	11.140	12.956	14.856
Tana Toraja	4.155	5.172	5.729	6.633	8.054	9.756
Luwu Utara	6.676	8.254	9.400	10.634	12.298	14.185
Luwu Timur	28.831	30.056	27.014	33.989	39.387	41.057
Toraja Utara	-	-	5.869	6.891	8.319	9.988
Kota Makasar	16.301	20.066	23.690	27.549	32.118	37.020
Kota Pare-Pare	3.565	10.316	11.901	13.842	15.882	17.997
Kota Palopo	8.461	9.926	11.410	13.112	15.291	17.272
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>8.907</b>	<b>10.825</b>	<b>12.567</b>	<b>141.614</b>	<b>16.929</b>	<b>19.466</b>

Sumber: BPS, 2013

## C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

### 1. Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Pertanian

Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor pertanian, yang diikuti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan. Kontribusi sektor pertanian termasuk juga perikanan dan rumput laut cukup besar dalam menyumbang total pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Tabel 2). Perekonomian Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor primer dan sumber daya manusia di pertanian tradisional. Tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan perekonomian lebih berorientasi pada agro industri dan agribisnis. Sektor-sektor utilitas yang mendukung industrialisasi, seperti listrik, air, dan gas berkontribusi rendah pada PDRB Sulawesi Selatan. Salah satu penyebab lambatnya transformasi pertanian menuju industri di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang lebih mengutamakan pertanian dibanding industri untuk mendukung posisi provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	23,65	27,10
2.	Pertambangan	6,97	7,55
3.	Industri Pengolahan	12,08	14,61
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,89	0,12
5.	Konstruksi	5,78	0,13
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	17,69	19,57
7.	Angkutan, Telekomunikasi	7,96	10,88
8.	Keuangan	7,81	9,54
9.	Jasa-jasa	17,17	10,51
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut, sektor basis daerah antara lain sektor pertanian, pertambangan, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa-jasa. Hal ini menunjukkan Sulawesi Utara memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut. Kuatnya sektor pertanian dalam perekonomian daerah dapat dilihat pada analisis sektor basis seperti yang ditunjukkan nilai LQ subsektor pertanian seperti tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan perikanan lebih besar dari satu (Tabel 3). Tingginya nilai LQ pada subsektor pertanian (kecuali peternakan dan kehutanan), subsektor pertambangan bukan migas, listrik dan air bersih, dan jasa-jasa pemerintah menunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibandingkan daerah lain.

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	2,12	2,11	2,05	2,09	2,07
a. Tanaman Bahan Makanan	2,07	2,06	2,02	2,06	2,07
b. Tanaman Perkebunan	2,98	2,98	2,82	2,82	2,59
c. Peternakan	0,72	0,72	0,73	0,75	0,78
d. Kehutanan	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
e. Perikanan	3,24	3,15	3,10	3,12	3,12
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	1,09	0,98	1,08	0,98	0,97
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
b. Pertambangan Bukan Migas	2,89	2,39	2,59	2,25	2,10
c. Penggalian	0,89	0,94	0,86	0,88	0,88
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,57	0,57	0,56	0,56	0,57
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	1,41	1,32	1,33	1,36	1,42
a. Listrik	1,91	1,90	1,91	1,90	1,94
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,19	1,24	1,25	1,27	1,32
<b>5. Konstruksi</b>	0,83	0,87	0,87	0,91	0,93
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	0,90	0,97	0,98	0,98	0,98
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,99	1,08	1,07	1,07	1,06
b. Hotel	0,33	0,35	0,37	0,38	0,38
c. Restoran	0,56	0,56	0,59	0,61	0,63
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	1,03	0,96	0,96	0,96	0,98
a. Pengangkutan	1,81	1,82	1,90	1,95	2,05
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,79	1,81	1,86	1,86	1,85
3). Angkutan Laut	2,81	2,84	2,94	3,00	2,96
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,14	0,15	0,00	0,00	0,00
5). Angkutan Udara	3,32	3,26	3,40	3,45	3,90
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,54	0,53	0,54	0,55	0,56
b. Komunikasi	0,38	0,36	0,35	0,35	0,36
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,68	0,71	0,77	0,81	0,86
a. Bank	0,73	0,78	0,90	0,98	1,07
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,57	0,64	0,69	0,76	0,80
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,92	0,94	0,97	1,01	1,03
e. Jasa Perusahaan	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,21	1,19	1,15	1,13	1,09

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Pemerintahan Umum	2,57	2,54	2,48	2,47	2,43
b. Swasta	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
1). Jasa Sosial Masyarakat	0,33	0,33	0,33	0,33	0,34
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,17	0,19	0,21	0,21	0,22
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah memiliki potensi namun masih kurang. Sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan, ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis. Ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Sementara itu, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja. Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor lain yang kurang produktif. Selama periode 2011-2014 sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan mampu menciptakan lapangan kerja yang signifikan (Tabel 4). Sektor-sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lain.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	1620177	1408447	-211730
2	Pertambangan	29315	28493	-822
3	Industri Pengolahan	200446	231974	31528
4	Listrik, Gas, Air	8100	13010	4910
5	Bangunan	178220	160583	-17637
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	621764	729346	107582
7	Angkutan & Telekomunikasi	172957	183530	10573
8	Keuangan	39436	65083	25647
9	Jasa-Jasa	406108	644253	238145
	<b>Total</b>	<b>3276523</b>	<b>3464719</b>	<b>188196</b>

Sumber: BPS, 2014

## 2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama tahun 2013 adalah pada konsumsi rumah tangga. PDRB Sulawesi Selatan didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah sementara konsumsi swasta masih sangat rendah (Tabel 5). Hal ini mengindikasikan pertumbuhan PDRB Sulawesi Selatan

masih lemah dari sisi peran dunia usaha dan kewirausahaan yang mengkondisikan inovasi dan efisiensi. Kontribusi investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting untuk pertumbuhan daerah sebesar 20 persen. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Salah satu indikatornya adalah kemudahan pelayanan perijinan, peningkatan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana investasi yang memadai.

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	47,17	51,28
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,87	0,67
3.	Konsumsi Pemerintah	33,29	13,39
4.	PMTB	19,73	26,15
5.	Perubahan Stok	1,52	2,15
6.	Ekspor	20,04	36,25
7.	Impor	32,62	29,88
	Total	100,00	100,00

*Sumber : BPS, 2013*

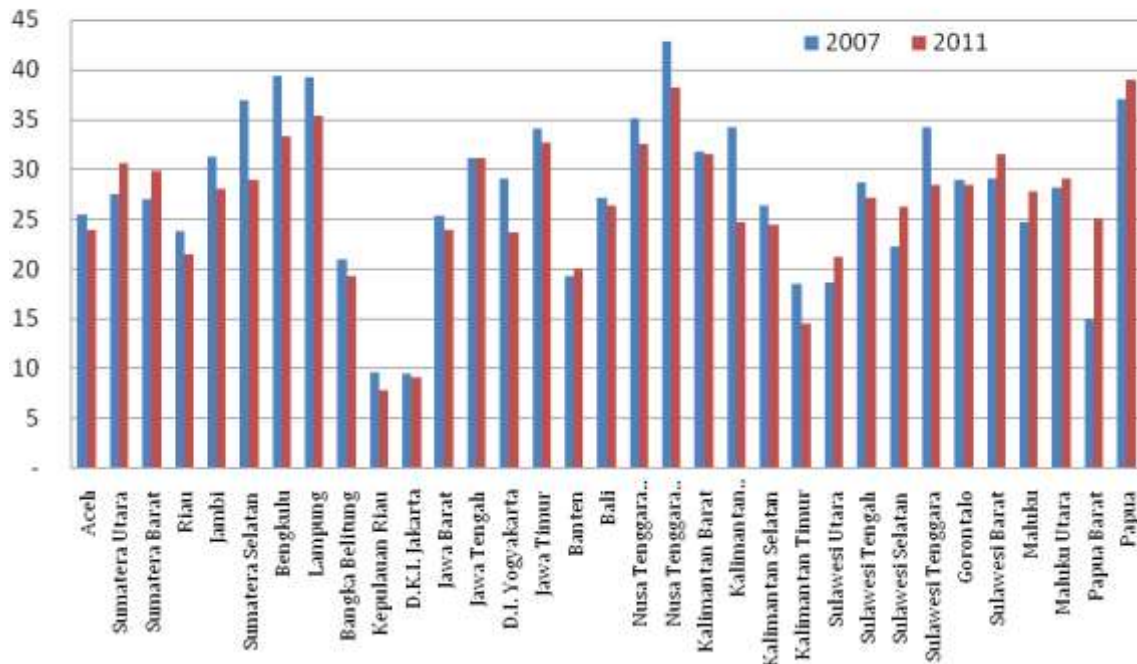
### 3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Selatan meningkat dari tahun 2007 ke 2011 dan termasuk tinggi secara nasional (Gambar 9). Pada tahun 2011 persentase pekerjaan kurang berkualitas di Sulawesi Selatan mencapai 27 persen.

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama. Agar pembangunan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan dapat terwujud diperlukan strategi yang bisa menciptakan iklim kondusif dalam rangka perluasan dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan berkualitas.



**Gambar 9**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Secara keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan memiliki jaringan jalan sepanjang 32.553 km, cukup baik secara kuantitas (Tabel 6). Indikator kerapatan jalan yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi di wilayah ini lebih tinggi dari angka nasional. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kerapatan jalan tertinggi di luar Pulau Jawa

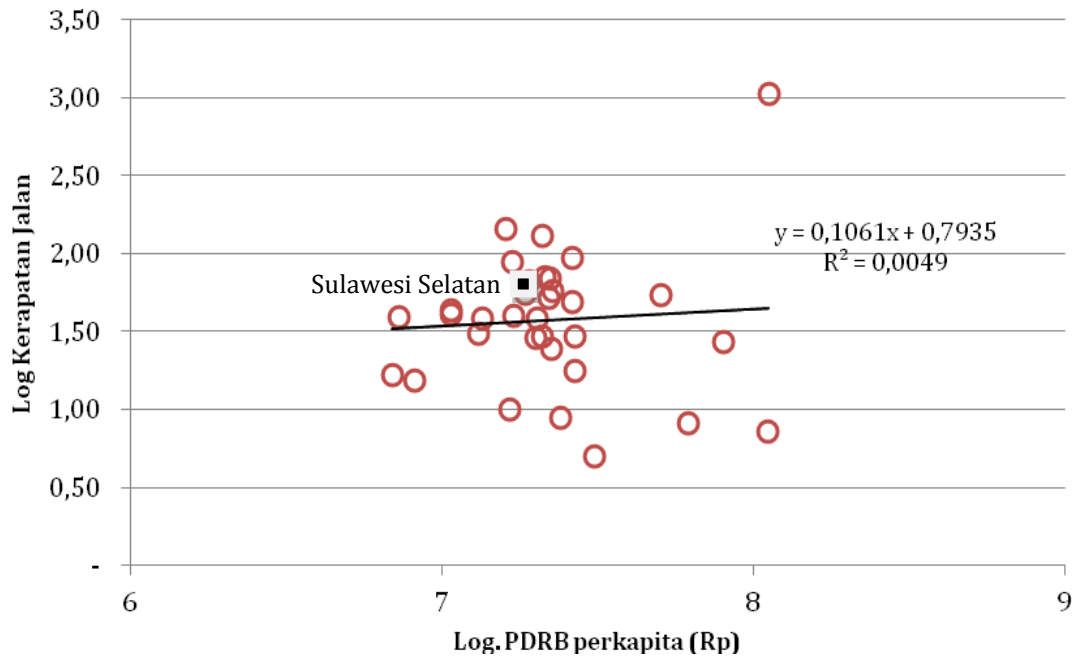
**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
<b>7</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>22.151</b>	<b>69,68</b>
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dapat dianalisis dengan membandingkan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita setara. Hal ini didasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian. Dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB perkapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Sulawesi Selatan relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian panjang jalan bukanlah masalah utama bagi Sulawesi Selatan.

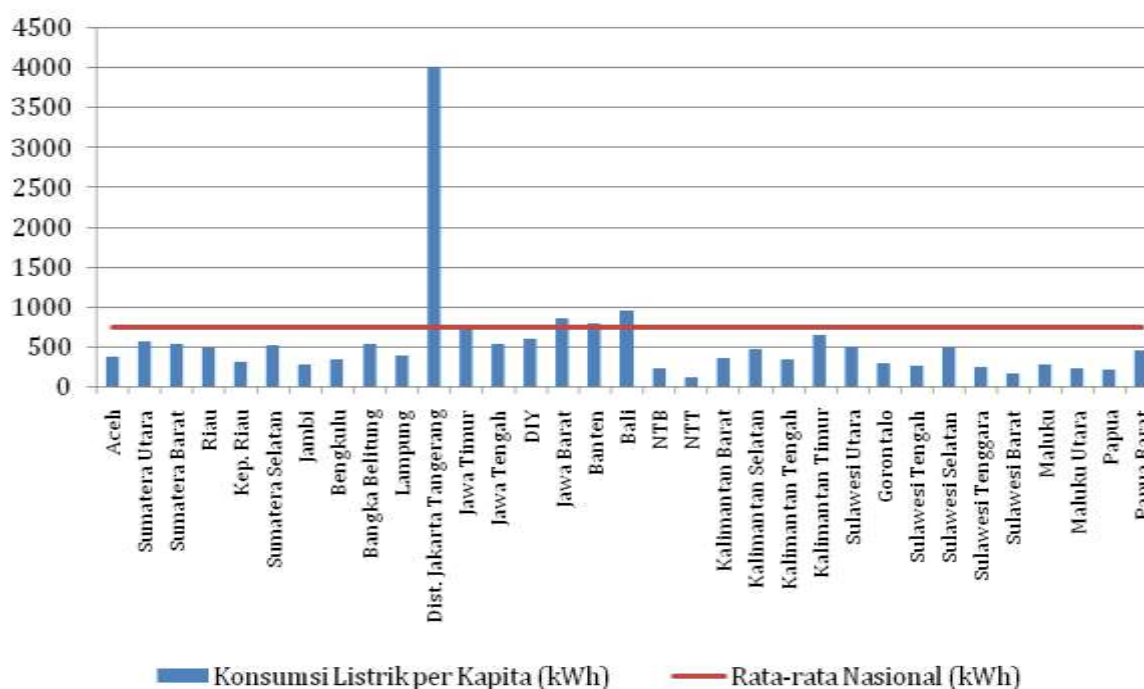
Secara kualitas, kondisi jalan di Sulawesi Selatan relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Sulawesi Selatan sudah mencapai 81 persen (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik.

**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sulawesi Selatan	1.024	81	137	11	93	8	6	0	2037	100
Sulawesi	5.103	81	678	11	469	8	24	0	6.274	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

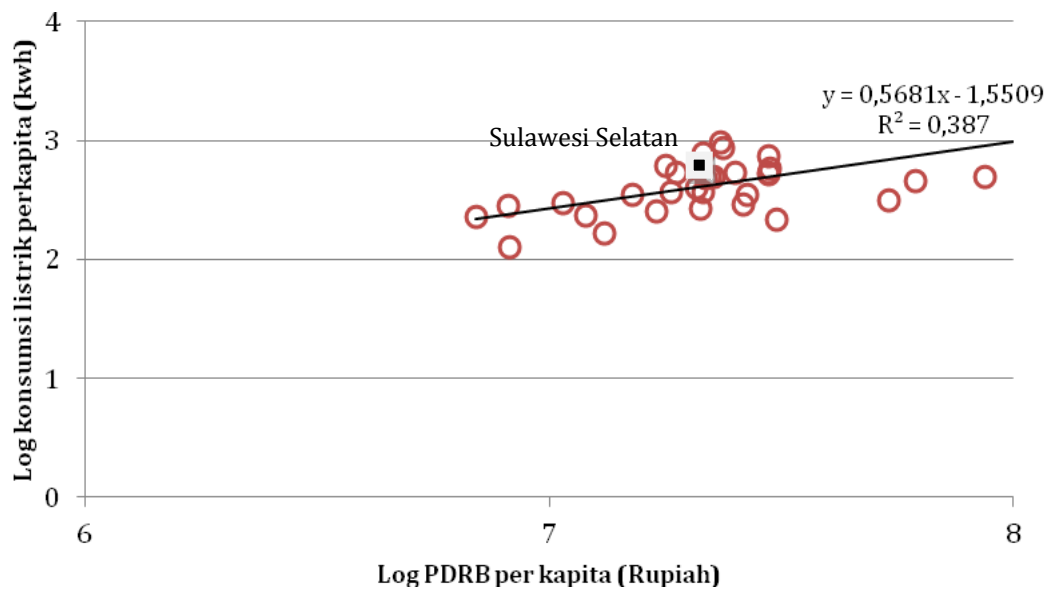
**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Sulawesi Selatan termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Sulawesi Selatan sedikit di atas kurva linier, menunjukkan ketersediaan jaringan listrik bukan menjadi masalah utama di Sulawesi Selatan.

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

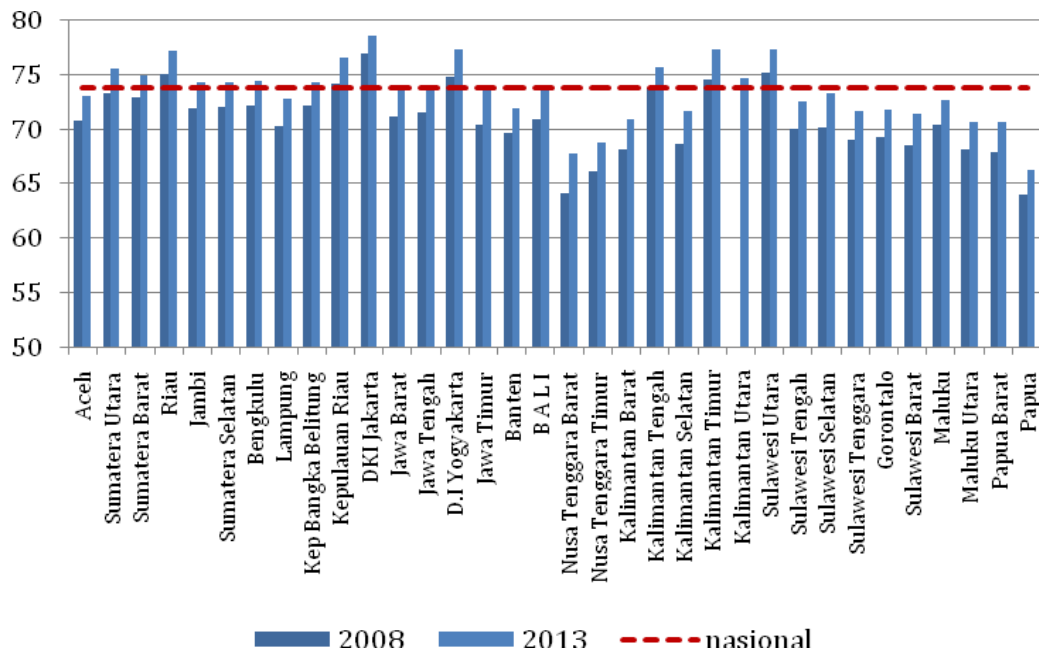
## 5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Selatan yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 walaupun masih di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

Dari 34 provinsi di Indonesia, IPM Sulawesi Selatan berada pada peringkat 19 dengan nilai IPM sebesar 73,28 pada tahun 2013. Capaian ini tetap membutuhkan perbaikan terus menerus untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 69,60 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,60 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan meningkat dari 7,23 tahun pada 2008 menjadi 8,01 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka

melek huruf, capaian di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 86,53 menjadi 89,69 persen, lebih rendah dari capaian nasional 94,14 persen.

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**



Sumber: BPS, 2013

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA di Sulawesi Selatan meningkat dari 30,17 persen pada tahun 2008 menjadi 39,71 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Lulusan pendidikan dasar SD dan SMP mengalami penurunan tahun 2008-2014. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas angkatan kerja yang menjadi modal berharga untuk mendukung agro industri dan agribisnis.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 (Feb)	Perubahan
1	≤ SD	1.724.371	1.651.054	(73.317)
2	SMP	601.409	566.163	(35.246)
3	SMTA Umum	724.333	941.150	216.817
5	Diploma I/II/III/Akademi	93.932	113.825	19.893
6	Universitas	186.518	405.384	218.866
<b>Total</b>		<b>3.330.563</b>	<b>3.677.576</b>	<b>347.013</b>

Sumber: BPS, 2014

## 6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat turut menentukan aktivitas perekonomian. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Sulawesi Selatan nilainya lebih besar dari satu dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat di Sulawesi Selatan, atau terdapat keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Sebagai perbandingan, rasio pinjaman terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Sulawesi adalah 1,34 dan rasio untuk nasional adalah 0,92 (Tabel 8).

**Tabel 8**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Sulawesi Selatan	60.731	81.430	1,34	0,90
Sulawesi	104.086	153.356	1,47	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

*Sumber: BPS, 2014*

Rasio PMTB terhadap simpanan di Sulawesi Selatan nilainya kurang dari satu, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Sulawesi Selatan bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat.

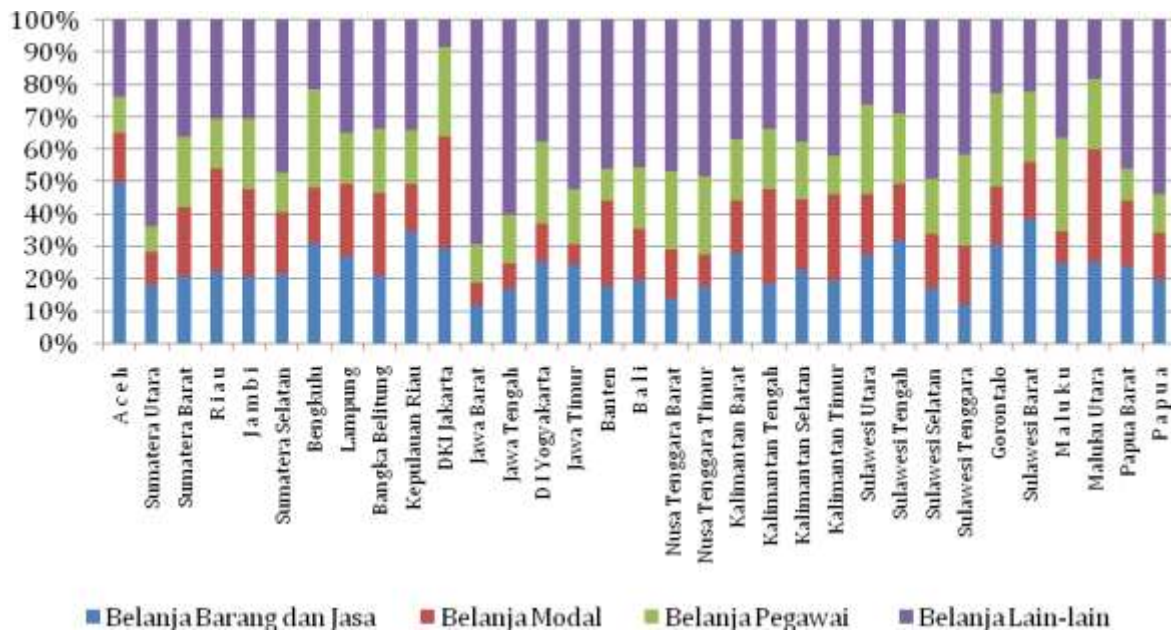
## 7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan kualitas komposisi anggarannya. Serapan belanja modal menunjukkan kinerja yang cukup rendah. Porsi belanja modal dalam total APBD Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 16,37 persen (Gambar 14). Sementara itu, komposisi dari belanja barang dan jasa sebesar 31,60 persen, belanja pegawai sebesar 22,12 persen, dan belanja lain-lain sebesar 28,79 persen.

Belanja modal memiliki dampak langsung terhadap perekonomian sehingga perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini perlu lebih diarahkan pada belanja modal (komponen investasi). Investasi pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian karena merupakan perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.



**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Pertumbuhan wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2015 memiliki prospek baik, dengan ditentukan oleh besarnya realisasi investasi di wilayah tersebut. Sulawesi Selatan memainkan peran penting dan strategis karena menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia melalui perhubungan laut (Pelabuhan Sukarno-Hatta), darat (titik awal Trans Sulawesi) dan udara (Bandara Sultan Hasanuddin). Perkembangan sosial ekonomi di Sulawesi selatan terus meningkat, yang diikuti oleh membaiknya pelayanan publik, meningkatnya belanja pemerintah daerah, dan meningkatnya pembangunan infrastruktur. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami peninglatan dari angka 0,36 menjadi 0,46, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Sulawesi Selatan tergolong rendah secara nasional, yang menciptakan suasana kondusif bagi penurunan kemiskinan, peningkatan kerukunan sosial, dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan.

Percepatan pengembangan ekonomi Sulawesi diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Sulawesi Selatan dijadikan hub internasional secara regional Sulawesi dan Nasional dan juga merupakan *center point* of Indonesia. Selain proyek-proyek infrastruktur utama yang secara langsung melewati Sulawesi Selatan, proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan lainnya juga diperkirakan akan memberi manfaat besar pada Sulawesi Selatan khususnya sebagai provinsi yang melayani provinsi lain dalam perdagangan internasional. Hal ini juga



sangat bergantung pada aksesibilitas wilayah Sulawesi Selatan dan konektivitasnya dengan provinsi lainnya di Sulawesi.

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,4 – 9,1 persen dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia telah meningkat pada akhir tahun 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pertumbuhan ini. Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tinggi turut menyumbang meningkatnya perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 9,1 – 6,6 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 10,32 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Sulawesi Selatan harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,72 poin persentase atau 0,62 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Sulawesi Selatan maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan;
- b. Pengembangan agrobisnis dan agro industri serta pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas transportasi seperti jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lain ;
- e. Peningkatan kapasitas suplai kelistrikan untuk mendukung industrialisasi
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- g. Peningkatan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- h. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah;

## 2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Penguatan dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, serta pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan kegiatan promosi citra komoditas unggulan daerah
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan dan kapasitas listrik wilayah serta pemenuhan infrastruktur dasar lainnya;
- e. Pemerataan akses pendidikan terutama pendidikan menengah baik pendidikan umum maupun kejuruan;
- f. Peningkatan kualitas belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.